

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN
GEREJA PERHIMPUNAN INJIL BAPTIS INDONESIA
PERSAHABATAN SURAKARTA

2.1. Organisasi

Organisasi merupakan suatu bentuk asosiasi formal, bersistem yang pengorganisasiannya dari sekelompok orang yang bekerjasama ingin mencapai tujuan bersama (Hasibuan, 2011). Menurut Mahsun (2013) organisasi adalah suatu wadah didalam sekumpulan orang yang berkelompok dan bekerjasama secara terstruktur dalam mencapai sasaran atau tujuan tertentu yang telah ditentukan bersama.

Organisasi juga merupakan suatu tatanan atau hubungan antara individu-individu yang bersifat tetap dengan melakukan kerjasama dalam melaksanakan proses korelasi dengan orang lain (Silalahi, 2011).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan organisasi merupakan sekelompok orang atas dasar visi dan misi, bekerja secara bersama dengan rasional, terencana, dipimpin serta terkendali guna memanfaatkan sumber daya yang ada, yang digunakan secara efisien serta efektif untuk mencapai tujuan.

2.2. Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan suatu institusi yang memakai dana dari masyarakat umum, seperti lembaga pemerintahan, organisasi partai politik, organisasi yayasan, lembaga pendidikan (sekolah, universitas), lembaga kesehatan (rumah sakit, puskesmas), organisasi dibidang rohani (masjid, gereja, kuil, vihara, pura, klenteng), lembaga swadaya masyarakat (Indra Bastian, 2006).

Organisasi sektor publik bisa dikategorikan menjadi tujuh kategori, antara lain : tidak berorientasi mengejar keuntungan, adanya perbedaan dalam pembayaran pajak, bertujuan dalam pelayanan, banyak mengalami

hambatan atau kendala pada tujuan serta strategi, banyak mengharapkan bantuan dari orang lain untuk memperoleh sumbangan berupa bantuan dalam keuangan, penguasaan yang profesional, pengaruh dari politik umumnya memainkan peranan yang substansial (Young, 2003).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan organisasi sektor publik adalah suatu lembaga yang menggunakan dana publik yang tidak mengejar laba, namun mengharapkan bantuan dari pihak luar untuk menjalankan organisasinya.

2.3. Gereja

Menurut dari Hadiwijono (1982), pengertian Gereja awal mulanya dari Bahasa Portugis yaitu Igreya yang merupakan parafrasa dari Bahasa Yunani yaitu Kriyiake, yang memiliki arti milik Allah, yang dimaksud dari milik Allah sendiri merupakan orang-orang yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Juru Selamat bagi manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Gereja memiliki arti sebagai persekutuan bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya.

Menurut Dirk Roy Kolibu (2018) bahwa gereja adalah sebuah persekutuan bagi orang percaya yang didalamnya terdapat orang Kristen untuk mendapatkan pengajaran mengenai iman kristiani, yang mencakup kegiatan sekolah minggu, pemuda remaja, pelayanan bagi orang dewasa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gereja adalah persekutuan bagi orang yang beriman untuk menyembah Allah dalam memperoleh pengajaran secara iman kristiani.

2.4. Akuntansi Sektor Publik

Erlina, dkk (2015) mengatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan proses dari penyusunan peristiwa perekonomian di dalam organisasi nirlaba seperti lembaga keagamaan, partai politik, lembaga

pendidikan (universitas, sekolah), lembaga kesehatan (rumah sakit, puskesmas).

Dwi Ratmono (2015) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan laporan transaksi finansial dari suatu organisasi dalam rangka mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses dalam mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan pembuatan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam menyajikan informasi finansial untuk pengambilan suatu keputusan.

2.5. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Robertson (2002) dalam Mahsun, dkk (2013) mengatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu proses penilaian di dalam kemajuan pekerjaan berkenaan dengan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang didalamnya meliputi informasi atas: efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang menghasilkan suatu barang dan jasa; mutu dari suatu barang dan jasa (diukur berdasarkan seberapa baik suatu barang atau jasa sampai ke pelanggan serta seberapa tinggi tingkat kepuasan dari pelanggan); hasil dari kegiatan diperbandingkan dengan harapan yang diinginkan; serta seberapa efektif tindakan dalam pencapaiannya.

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang memiliki tujuan dalam membantu manajer publik dalam menilai suatu pencapaian strategi menggunakan alat ukur baik secara finansial maupun non finansial.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah penetapan serangkaian aktivitas dalam penilaian kinerja berdasarkan ukuran finansial atau non finansial,

dalam mengukur sampai sejauh mana antara hasil serta manfaat yang sudah ditentukan di dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.6. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pelaksanaan suatu kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kegagalan dalam menjalankan visi misi untuk memperoleh sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan menggunakan instrument pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Sedarmayanti, 2003). Pengertian di atas merupakan bentuk pertanggungjawaban di dalam pengendalian sumber daya dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Rakhmat, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa akuntabilitas dibagi menjadi dua, antara lain akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap atasan. Akuntabilitas secara horizontal adalah pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap masyarakat secara luas.

Mahmudi (2013) juga membagi akuntabilitas menjadi ke dalam dua bagian, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas secara vertikal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pada pihak yang memiliki wewenang di atasnya terhadap aset gereja.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas secara horizontal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap kalangan masyarakat secara luas akan kepengurusan aset gereja.

2.7. Akuntabilitas Publik

Menurut Mahmudi (2010) Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan terhadap pihak yang bertanggung jawab guna mempertanggungjawabkan, menyampaikan, menampilkan, serta memaparkan semua kegiatan yang sudah dilangsungkan, yang telah diberikan kepada pihak yang telah bertanggungjawab atau yang telah diberikan kepercayaan.

Akuntabilitas publik merupakan keharusan dari pemegang amanah dalam mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan berbagai aktivitas yang berkaitan atas pemakaian sumber daya publik terhadap pihak pemberi amanat (Bastian, 2016).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban dari pihak yang telah diberi kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, melaporkan dari aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada publik.

2.8. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi-organisasi secara umum untuk mengonsumsi dana publik dengan efisien serta praktis, dan tidak ditemukannya tindak korupsi ataupun penggunaan dana secara boros. Akuntabilitas keuangan adalah bagian yang krusial karena merupakan titik pusat perhatian yang paling fundamental atau utama (Mahmudi, 2013).

Pemaknaan prinsip dari akuntabilitas keuangan pada tiap jenjang organisasi di gereja memiliki makna prinsip akuntabilitas yang dapat dihayati pada acara perjamuan malam tuan yang tentunya melibatkan semua pihak organisasi baik dari sekertaris gereja, yang diimplementasikan kedalam kegiatan pelaporan hasil keuangan yang melibatkan gembala sidang maupun ketua umum. Pada rapat besar yang

diadakan dalam organisasi gereja ditunjukkan dengan adanya transparansi atau keterbukaan dengan menyeluruh sebagai wadah partisipasi secara aktif kepada masyarakat di dalam pengelolaan organisasi publik (Andrianto, 2007).

2.9. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut IAI (2007) yaitu suatu kemampuan dari organisasi di dalam melakukan pengelolaan serta pengendalian sumber daya yang dimiliki. Fahmi (2012) menyebutkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi yang merupakan hasil yang telah diraih berkat kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Menurut Jumingan (2006) Kinerja keuangan sendiri dapat dilakukan penilaian dari beberapa alat-alat analisis antara lain:

- a. Analisis dari perbandingan laporan hasil keuangan, yaitu analisis dengan membandingkan antara laporan hasil keuangan dalam dua periode atau mungkin lebih dengan memperlihatkan adanya perubahan baik dalam bentuk persentase maupun jumlah.
- b. Analisis trend, yaitu suatu teknik analisis guna mengetahui kecenderungan dari keadaan finansial, apakah memperlihatkan kenaikan atau kemerosotan
- c. Analisis dari persentase per komponen, yaitu teknik analisis guna mengetahui dari persentase investasi pada setiap aktiva mengenai keseluruhan total aktiva ataupun hutang.

2.10. Kinerja Keuangan Organisasi Publik

Kinerja keuangan organisasi publik merupakan suatu bentuk ukuran kinerja bagi organisasi publik yang memakai indikator finansial (Sularso, 2011).

Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan organisasi publik merupakan suatu bentuk analisis yang dikerjakan untuk melihat sampai sejauh mana suatu organisasi publik sudah mewujudkan dengan baik dan benar peraturan-peraturan dari pelaksanaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan organisasi publik merupakan bentuk dari penilaian kinerja pada masa lalu dengan menggunakan berbagai analisis sehingga memperoleh posisi dari keuangan yang akan berlanjut pada masa depan dengan melihat dari sejumlah peraturan.

2.11. Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Publik Bidang

Keagamaan

Kinerja keuangan organisasi keagamaan merupakan suatu kemampuan organisasi nirlaba yaitu gereja dalam menggali serta mengurus sumber-sumber dari keuangan di dalam memenuhi kebutuhan demi mendukung berjalannya sistem organisasi, pelayanan kepada publik serta memiliki kebebasan dalam memanfaatkan dana-dana tersebut demi kepentingan publik (Foster, 1986).

Isna dan Ayu (2015) kinerja keuangan organisasi keagamaan adalah salah satu isu penting untuk dilakukan pengkajian dalam organisasi sektor publik, mulai dari dipraktikkannya penganggaran berbasis yaitu kinerja, semua organisasi sektor publik diminta dapat menghasilkan dari kinerja keuangan organisasi publik secara wajar dengan memperhatikan dari tingkat efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan organisasi publik dalam bidang keagamaan merupakan hasil kinerja organisasi keagamaan dalam mengelola keuangan organisasi yang melibatkan penghimpunan serta penyaluran dana dalam merealisasikan visi misi organisasi keagamaan.

Analisis kinerja keuangan organisasi gereja adalah suatu proses dalam peninjauan secara kritis mengenai penganalisisan data baik dalam penghitungan data, pengukuran data, mengintegrasikan data, dan memberi kesimpulan terhadap kinerja keuangan gereja dalam periode waktu tertentu (Jumingan, 2006).

2.12. Pengelolaan Keuangan Gereja

Secara umum pemahaman mengenai pengelolaan keuangan suatu organisasi adalah kegiatan yang dijalankan oleh pengelola keuangan organisasi yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Jika dalam konteks organisasi gereja maka dapat didefinisikan bahwa pengelolaan keuangan gereja adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak gereja dalam hal ini pengurus gereja sesuai dengan struktur hirarki organisasi di dalamnya dan pengelolaan keuangan di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

Umat atau jemaat gereja setidaknya perlu mengetahui pengelolaan keuangan gereja dan tahapannya agar dapat ikut mengawasi transparansi dalam penggunaan anggaran di dalam gereja itu sendiri, serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam periode selanjutnya.

Dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi setidaknya mencakup beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan, antara lain:

- (1) *Transparansi*, bahwa anggota organisasi bebas mendapatkan informasi mengenai penggunaan keuangan dalam pengembangan organisasi;
- (2) *Efisien*, bahwa setiap pengeluaran anggaran organisasi didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan organisasi guna menghasilkan output ataupun income tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada komunitas;
- (3) *Efektif*, bahwa penerapan kebijakan

keuangan harus digunakan sesuai sasaran dan kebutuhan komunitas, serta anggarannya direalisasikan sesuai dengan rencana program; (4) *Akuntabilitas*, bahwa pengelolaan keuangan organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota organisasi; (5) *Partisipatif*, bahwa terdapat peran serta baik secara langsung maupun tidak langsung dari komunitas dalam melakukan kajian, koreksi, kritikan, serta saran yang membangun terhadap sistem pengelolaan keuangan organisasi yang akuntabel.

